



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

**KOMISI VIII DPR RI (BIDANG AGAMA, SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEBENCANAAN)**

| | |
|------------------|---|
| Tahun Sidang | : 2023-2024 |
| Masa Persidangan | : IV |
| Rapat Ke | : 10 |
| Jenis Rapat | : Rapat Kerja |
| Dengan | : Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, Menteri Sosial RI, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan dan Menteri Ketenagakerjaan RI |
| Sifat Rapat | : Terbuka |
| Hari, Tanggal | : Senin, 25 Maret 2024 |
| Waktu | : 10.00 WIB - Selesai |
| Tempat | : Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI Gedung Nusantara II lantai 1 Jl. Jenderal Gatot Subroto – Jakarta 10270. |
| Acara | : 1. Pandangan Umum Mini Fraksi-fraksi; 2. Pengambilan Keputusan atas RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada fase 1000 hari pertama kehidupan |
| Ketua Rapat | : Dr. H. Ashabul Kahfi, M.Ag. |
| Sekretaris Rapat | : Mc. Zaqki Zachariaz Thamrin, S.S., M.Si. |
| Hadir | : 1. 45 dari 51 Anggota Komisi VIII DPR RI; 2. 6 Anggota Komisi VIII DPR RI Izin; 3. Menteri PPPA; 4. Kementerian Hukum dan Ham; 5. Kementerian Dalam Negeri; 6. Kementerian Kesehatan; 7. Kementerian Ketenagakerjaan; 8. Kementerian Koordinator Bidang PMK. |

I. PENDAHULUAN:

1. Ketua Rapat membuka Rapat Komisi VIII DPR RI pada pukul 10.25 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi VIII DPR RI, Dr. H. Ashabul Kahfi, M.Ag dengan didampingi Para Wakil Ketua Hj Diah Pitaloka, S.Sos., M.Si., Wakil Ketua DR. H. TB. Ace Hasan Syadzily, M.Si dan Wakil Ketua H. Marwan Dasopang, M.Si, sesuai waktu dan tempat acara tersebut di atas.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

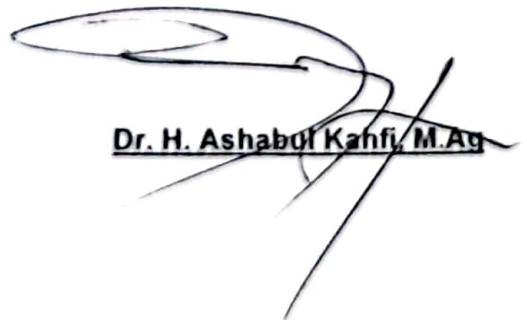
Dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, Menteri Sosial RI, Menteri Hukum Dan Hak Asasi RI, Menteri Dalam Negeri RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri Ketenagakerjaan RI, yang agendanya: **Pengambilan Keputusan di Tingkat I atas RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan.**

1. Komisi VIII DPR RI dan Pemerintah menyetujui agar RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan dapat diproses lebih lanjut, dibahas dan diambil keputusan di tingkat II, di Rapat Paripurna.
2. Semua fraksi di Komisi VIII DPR RI menyetujuinya tanpa catatan, kecuali Fraksi PKS yang menyetujui dengan catatan: menambah frase dengan perkawinan yang sah dalam definisi keluarga, menghapus asas kesetaraan gender di Pasal 2 huruf c karena sudah ada asas nondiskriminatif, menambah masa cuti bagi suami yang mendampingi istrinya melahirkan, yaitu selama 1 minggu, dan dalam klausul menimbang ditambah Pasal 28 B ayat (1), dan Pasal 34 UUD 1945.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 12.22 WIB.

**PIMPINAN KOMISI VIII DPR RI
KETUA,**



Dr. H. Ashabul Kahfi, M.Ag